



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2010 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015 sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015 maka diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5237);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretarian DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten OganKomeing Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 7).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2010 – 2015 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015.
- (2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015 dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2015 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 9 April 2012

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 9 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 12

Lampiran : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor : 12 Tahun 2012
 Tanggal : 9 April 2012

INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2010 - 2015

TUJUAN (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	SATUAN (4)	TARGET YANG AKAN DICAPAI					PENAGGUNGJAWAB (10)
				2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	1. Peningkatan kualitas kelulusan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	84.00	84.67	86.00	86.60	88.00	DIKNAS
		- SD	%	99.00	101.00	104.00	106.00	109.00	DIKNAS
		- SMP	%	77.00	77.00	78.00	78.00	79.00	DIKNAS
		- SMA	%	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	DIKNAS
		2. Angka Partisipasi Murni (APM)	%	84.37	84.99	85.57	87.66	88.75	DIKNAS
		- SD	%	84.00	87.00	89.00	91.00	93.00	DIKNAS
		- SMP	%	77.00	77.00	78.00	78.00	79.00	DIKNAS
		- SMA	%	74.00	75.00	76.00	81.00	93.00	DIKNAS
		3. Angka Kelulusan (AK)	%	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	DIKNAS
		- SD	%	0.40	0.20	0.40	0.40	0.40	DIKNAS
		- SMA	%	0.10	0.40	0.10	0.10	0.10	DIKNAS
		4. Angka Putus Sekolah (APS)	%	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	DIKNAS
		5. Angka Melek Huruf (AMH)	%	98.50	99.00	99.50	99.80	100.00	DIKNAS
		6. Rata-rata lamanya sekolah	tahun	8.11	8.25	8.45	8.65	8.84	DIKNAS
2. Peningkatan akses pendidikan dalam suasana yang kondusif		7. Rasio sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	4.43	4.44	4.45	4.46	4.47	DIKNAS
		8. Rasio guru terhadap siswa	%	4.48	4.50	4.60	4.70	4.80	DIKNAS
		9. Rasio sekolah dalam kondisi baik	%	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	DIKNAS
		10. Jumlah PAUD	unit	68.00	78.00	88.00	98.00	108.00	DIKNAS
		11. Jumlah taman bermain	unit	3.00	3.00	5.00	7.00	11.00	DIKNAS
		12. Pengunjung perpustakaan daerah per tahun.	orang	3,836.00	4,068.00	4,278.00	4,568.00	4,768.00	KA. PERPUS, K DAN D
	3. Peningkatan budaya baca masyarakat								
4. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	4. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	13. Jumlah sarana olahraga	unit	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	DISPORABUDPAR
		14. Jumlah organisasi pemuda	organisasi	50.00	41.00	50.00	50.00	50.00	DISPORABUDPAR

TUJUAN (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (3)	SATUAN (4)	TARGET YANG AKAN DICAPAI					PENAGGUNJAWAB (10)
				2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)	2015 (9)	
5. Pelestarian budaya dan benda cagar budaya	6. Peningkatan kualitas hidup masyarakat	15. Jumlah sanggar seni dan budaya	klp	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR
		16. Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	unit	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
7. Peningkatan derajat kesehatan	8. Akses kesehatan masyarakat	17. Indeks Pembangunan Manusia	poin	72.65	72.85	72.94	73.35	73.58	BALITBANG & STATISTIK
		18. Angka usia harapan hidup (Longevity)	tahun	75.19	76.80	78.17	79.35	80.40	
9. Iptek untuk pengelolaan sumberdaya		19. Angka Kematian bayi per 1.000 KH	anak	10.00	9.00	9.00	8.00	8.00	DINKES
		20. Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	jiwa	14.00	13.00	10.00	8.00	5.00	
		21. Prevalensi gizi buruk	%	1.10	1.00	0.80	0.70	0.50	DINKES
		22. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	unit/pend	2.87	2.93	2.97	3.02	3.08	
		23. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk							DINKES
		- Puskesmas (30.000)	unit/pend	11.48	11.73	11.90	12.11	12.32	
		- Poliklinik (3.000)	unit/pend	114.80	117.73	119.00	121.10	123.20	DINKES
		- Pustu (10.000)	unit/pend	34.40	35.20	35.70	36.30	36.90	
		24. Rasio dokter per satuan penduduk (10.000)	dokter/pend	34.00	35.00	36.00	36.00	37.00	DINKES
		25. Rasio tenaga kerja medis per satuan penduduk (10.000)	medis/pend	102.00	105.00	108.00	108.00	111.00	
		26. Bed Occupancy Rate (BOR) (60-85%)	%	88.67	89.00	80.00	80.00	80.00	DINKES
		27. Average Length of Stay (Av. LOS, 6 - 8 hari)	hari	5.05	5.00	5.00	4.00	4.00	
		28. Pelayanan spesialisasi pelengkap (Anastesi, Mata, THT, Kulit, Syaraf, Jiwa, Gigi dan Mulut)	spesialisasi	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	RSUD
		29. Akreditasi pelayanan	pokja	5.00	5.00	12.00	12.00	16.00	
		30. Standar Pelayanan Minimal RSUD (100%)	%	15.00	30.00	50.00	69.00	70.00	RSUD
		31. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (1 TT/1.500 penduduk)	TT	202.00	208.00	256.00	300.00	300.00	
9. Iptek untuk pengelolaan sumberdaya		32. Jumlah studi/penelitian	lap/prop	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	BALITBANG & STATISTIK
		33. Penerapan iptek pada usaha ekonomi rakyat	lap/prop	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET YANG AKAN DICAPAI					PENAGGUNJAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan didukung oleh perekonomian daerah yang unggul dan berdaya saing Tinggi	10. Pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak	34 Reprerentasi perempuan di DPR	%	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	SEKRETARIAT DPRD
		35 Rasio perempuan dalam jabatan struktural	%	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	BKBPP
		36 Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	64.00	68.00	69.00	71.00	74.00	BKBPP
		37 Indeks Pembangunan Gender	indeks	68.70	69.30	70.20	70.80	71.00	BKBPP
		38 Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	60.12	60.32	60.45	60.76	60.99	BKBPP
		39 Jumlah kejadian KDRT dalam setahun	kali	17.00	15.00	13.00	12.00	10.00	BKBPP
	11. Nilai tambah produk unggulan wilayah	40 PDRB (atas dasar harga konstan)	Rp.juta	3,045,512.00	3,132,638.00	3,219,764.00	3,306,890.00	3,394,016.00	BALITBANG & STATISTIK
		41 Nilai tambah pertanian	Rp.juta	789,164.00	826,430.00	863,697.00	900,965.00	938,232.00	BALITBANG & STATISTIK
		42 Nilai tambah pertambangan dan energi	Rp.juta	622,452.00	624,987.00	627,522.00	630,057.00	632,592.00	BALITBANG & STATISTIK
		43 Nilai tambah industri pengolahan	Rp.juta	291,074.00	298,648.00	306,221.00	313,795.00	321,369.00	BALITBANG & STATISTIK
		44 Nilai tambah listrik, gas dan air bersih	Rp.juta	6,244.00	6,472.00	6,700.00	6,929.00	7,157.00	BALITBANG & STATISTIK
		45 Nilai tambah bangunan	Rp.juta	214,060.00	222,745.00	231,430.00	240,116.00	248,801.00	BALITBANG & STATISTIK
		46 Nilai tambah perdagangan hotel dan restoran	Rp.juta	501,598.00	524,639.00	547,679.00	570,720.00	593,760.00	BALITBANG & STATISTIK
		47 Nilai tambah pengangkutan dan komunikasi	Rp.juta	65,101.00	68,667.00	72,228.00	75,789.00	79,350.00	BALITBANG & STATISTIK
	48 Nilai tambah keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	Rp.juta	122,101.00	127,045.00	131,989.00	136,934.00	141,878.00	BALITBANG & STATISTIK	
	49 Nilai tambah jasa-jasa	Rp.juta	286,201.00	298,852.00	311,502.00	324,153.00	336,803.00	BALITBANG & STATISTIK	
12. Ekonomi kerakyatan berbasis UMKM-K	50 Jumlah usaha mikro dan kecil	unit	3,284.00	3,499.00	3,743.00	4,063.00	4,393.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	51 Jumlah UMKM	unit	3,123.00	3,186.00	3,391.00	3,619.00	3,877.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	52 Prosentase koperasi aktif	%	86.00	90.00	95.00	97.00	99.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	53 Jumlah BPR/LKM	unit	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	54 Jumlah lembaga perbankan pendukung UMKM	unit	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
13. Ketahanan Pangan, diversifikasi dan kesejahteraan petani	55 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	perda	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	BPM	
	56 Ketersediaan pangan utama	ton	119,324.30	124,314.80	129,507.60	134,911.00	140,534.10	BADAN KP	
	57 Skor pola pangan harapan	point	86.40	87.90	89.40	90.90	92.40	BADAN KP	
	58 Pengeluaran RT non-pangan	Rp.juta	580,534.00	608,820.00	638,746.00	670,392.00	703,211.00	BADAN KP	
	59 Rata-rata pengeluaran RT per bulan	Rp.juta	1,308,954.00	1,364,343.00	1,421,605.00	1,480,371.00	1,541,988.00	BADAN KP	
14. Simpul perdagangan dan daya saing produk	60 Jumlah kluster industri	unit	54.00	57.00	60.00	63.00	66.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	61 Jumlah pasar tradisional	unit	44.00	48.00	52.00	56.00	60.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	62 Jumlah pasar modern	unit	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	DISPERINDAGKOP & UKM	
	63 Jumlah terminal	unit	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	DISHUB	
	64 Jumlah komoditi ekspor	komiditi	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	DISPERINDAGKOP & UKM	

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET YANG AKAN DICAPAI					PENAGGUNJAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sehingga mampu mereduksi kesenjangan antara desa dan kota	15. Infrastruktur kondisi baik	65 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	km/kend	0.18	0.20	0.24	0.26	0.30	DINAS PU BM
		66 Rasio panjang jalan jalan Kabupaten dalam kondisi baik							
	16. Pemerataan sarana dan prasarana perkotaan	- Negara	%	96.00	-	-	-	-	DINAS PU BM
		- Propinsi	%	90.00	-	-	-	-	DINAS PU BM
		- Kabupaten	%	71.00	72.00	73.00	73.00	74.00	DINAS PU BM
		Jembatan dalam kondisi baik	%	92.00	95.00	95.00	95.00	95.00	DINAS PU BM
		Luas area sawah yang dialiri irigasi (non teknis)	ha	1,565.00	1,670.00	1,750.00	1,800.00	1,825.00	DINAS PU CK, P & T
		Prosentase cakupan pelayanan air bersih	%	13.50	15.00	18.00	21.50	25.00	DINAS PU CK, P & T
		Jumlah Rumah Tangga berlistrik	RT	46,205.00	46,526.00	46,590.00	46,700.00	46,750.00	DPE
		Rasio elektrifikasi	%	64.00	67.00	70.00	76.00	85.00	DPE
		Kebutuhan daya listrik	kVA	50,995.00	51,467.00	52,241.00	52,719.00	53,776.00	DPE
	17. Pemerataan sarana dan sarana publik	Rasio pemenuhan kantor desa/kelurahan	%	60.00	70.00	85.00	100.00	100.00	DINAS PU CK, P & T
		Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas	kec	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	DINKES
		Jumlah kecamatan yang memiliki pasar tetap	kec	4.00	4.00	5.00	5.00	6.00	DISPERINDAGKOP & UKM
	18. Pembangunan berwawasan lingkungan	Taman Pemakaman Umum (TPU) Baturaja	unit	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	BAG. PERLENGKAPAN
		Kinerja Pasar Induk	%	50.00	60.00	75.00	85.00	90.00	DISPERINDAGKOP & UKM
		Kinerja Terminal Type A	%	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	DISHUB
		Kinerja sarana olahraga	%	70.00	70.00	80.00	80.00	90.00	DISPORABUDPAR
		Kinerja Islamic Centre	%	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	BAG. UMUM
		TPA sampah regional	unit	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN
		Rasio penanganan sampah	%	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN
		Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	15.00	17.00	20.00	25.00	30.00	BLH
		Persentase perusahaan yang memiliki AMDAL	%	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	BLH
	18. Pembangunan berwawasan lingkungan	Penyelesaian kasus lingkungan	%	80.00	90.00	90.00	100.00	100.00	BLH
		Presentase kawasan kumuh	%	20.00	18.00	16.00	14.00	12.00	DINAS PU CK, P & T
		Luas lahan kritis	ha	166,612.00	166,512.00	166,412.00	166,312.00	166,312.00	DINAS BUNHUT
		Jumlah dokumen peraturan perencanaan tata ruang	dokumen	1.00	2.00	3.00	4.00	4.00	BAPPEDA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET YANG AKAN DICAPAI					PENAGGUNJAWAB
				2011	2012	2013	2014	2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, yang ditandai dengan jalannya pemerintahan yang semakin efektif dan efisien	19. Pariwisata yang berdaya saing	89 Jumlah atraksi wisata 90 Jumlah promosi wisata 91 Persentase obyek wisata yang dikelola 92 Jumlah wisman dan wisnus 93 Kontribusi pariwisata terhadap PAD	atraksi kali % orang Rp.juta	2.00 3.00 40.00 30/11,000.00 137.00	4.00 4.00 50.00 60/13,000.00 144.00	6.00 5.00 60.00 80/15,000.00 151.00	8.00 6.00 80.00 100/15,000.00 158.00	10.00 7.00 150/16,000.00 165.00	DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR DISPORABUDPAR BAG. ADM P. UMUM DINAS KOMINFO BAG. HUKUM BAG. ORGANISASI BAG. KEUANGAN
	20. Pemerintahan responsif, transparan, akuntabel	94 Laporan penyelenggara pemerintah daerah 95 Penerapan e-government 96 Jumlah regulasi partisipasi publik	peringkat % lap/prop	1.00 60.00 39.00	1.00 70.00 39.00	1.00 75.00 40.00	1.00 75.00 41.00	1.00 80.00 42.00	 BAG. ADM P. UMUM DINAS KOMINFO BAG. HUKUM
	21. Pemerintahan yang efektif dan efisien	97 Hasil penilaian dokumen LAKIP 98 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	huruf opini	C WDP	C WDP	B WDP	B WTP	A WTP	BAG. ORGANISASI BAG. KEUANGAN
	22. Kesetaraan gender, keadilan, dan kepastian hukum	99 Jumlah pegawai perempuan di lembaga pemerintah 100 Rasio tindak lanjut temuan BPK	orang %	4,292.00 100.00	4,300.00 100.00	4,350.00 100.00	4,357.00 100.00	4,380.00 100.00	BKBPP INSPEKTORAT
	23. Pelayanan publik yang semakin baik	101 Keberadaan perda tentang standar pelayanan publik 102 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	perda %	13.00 55.00	13.00 60.00	14.00 60.00	14.00 70.00	15.00 70.00	BAG. HUKUM BAG. ORGANISASI
	24. Sinergi pemerintahan, masyarakat dan swasta	103 Pola kemitraan 104 Jumlah peraturan yang mendukung iklim usaha	Unit/Kelom Perda/Perbub/SK	1.00 1.00	2.00 2.00	2.00 2.00	3.00 2.00	3.00 2.00	BAPPEDA BAG. HUKUM

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI